

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang

Syamsul Furkan ^{1*}, Ida Rachmawati ², Jumadi ³

^{1, 2, 3} Universitas Tangjungpura, Indonesia

* syamsulfurkan1974@gmail.com

Abstrak

Urgensi penelitian ini yaitu pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan stunting, namun pada nyatanya angka stunting masih tinggi atau bisa dikatakan tidak mengalami penurunan secara stabil dalam sepuluh tahun terakhir ini. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan analisis tentang Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, dengan menggunakan model implementasi *Van Metter* dan *Van Horn*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam indikator yang diteliti. Sumber data penelitian berasal dari para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat aktif dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan penanganan dan upaya pencegahan stunting di Kabupaten Sintang. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh dari wawancara dan observasi diklasifikasikan dan dikelompokkan sesuai jenisnya, kemudian diolah dalam bentuk narasi. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta proses penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Serta Triangulasi sumber, teriangularisasi data dan triangulasi waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari indikator pertama yaitu Standar dan Tujuan kebijakan, mengacu kepada regulasi kebijakan sudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para implementor, dengan melaksanakan komunikasi lintas TPPS di Kecamatan Kayan Hulu, dan pelayanan kesehatan melalui Posyandu dan Bidan Desa, dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Kayan Hulu menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, Kurang tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia serta pengaruh dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Adapun saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini agar Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu terus meningkatkan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menanggulangi kasus stunting di Kecamatan Kayan Hulu dan terus menjalin kerjasama antar SKPD yang terkait dan juga memberikan pengarahan kepada Puskesmas untuk terus melakukan pemantauan terhadap *stunting*.

Keywords: *Implementasi Kebijakan, Penurunan Stunting, Kualitatif*

Pendahuluan

Stunting telah menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang memerlukan perhatian serius (Hatijar, 2023). Menurut laporan UNICEF, WHO, dan Bank Dunia (2021), lebih dari 22% serta 178 juta anak dibawah usia lima tahun diperkirakan mengalami pertumbuhan terhambat karena *stunting* (Rahmadhita, 2020). Masalah ini memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental, dan produktivitas manusia (Imeldawati, 2025). Dalam konteks global, *stunting* dianggap sebagai ancaman terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, sehingga menjadi salah satu target utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) (Rahmawati et al., 2019). Pemerintah Indonesia telah

mengakui *stunting* sebagai prioritas nasional. Komitmen ini ditunjukkan dengan dimasukkannya *stunting* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dengan tujuan penurunan yang cukup besar dari proyeksi 27,6% pada 2019 menjadi 14% pada 2024. *Stunting* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan (Ansori, 2022).

Berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021, prevalensi *stunting* pada anak balita di Indonesia mencapai angka 24,4%, yang jauh di atas angka ambang batas WHO sebesar 20%. Fenomena ini bukan hanya mengancam masa depan anak-anak yang terkena dampak, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas SDM Indonesia. (Kemenkes RI, 2024). *Stunting* merupakan masalah gizi buruk yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak, yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka panjang (Muharram, 2025). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *stunting* berhubungan dengan tingginya angka kematian anak, penurunan produktivitas, dan gangguan perkembangan kognitif yang dapat menghambat kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan (Novianti, 2021). Menteri Kesehatan Indonesia, Prof. Dr. dr. Nila Tarid Moloe, S.P.M (K), mengimbau para orang tua untuk mendorong anak-anak mereka merencanakan kehamilan dengan matang jika mereka atau pasangannya hamil. Beliau menekankan pentingnya memberikan kasih sayang dan makanan bergizi untuk mencegah *stunting* dan membantu anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat dan cerdas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, Indonesia memiliki tingkat *stunting* tertinggi di Asia Tenggara, dengan proyeksi angka 23,6% pada tahun 2024, meskipun angka tersebut diperkirakan akan menurun seiring waktu (Kemenkes RI, 2024).

Pemerintah Indonesia baru-baru ini memprioritaskan upaya untuk menurunkan angka *stunting*, dengan menangani masalah gangguan pertumbuhan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang (Sumanti, 2024). Menurut riset gizi Kementerian Kesehatan Indonesia, angka *stunting* pada tahun 2021 masih relatif tinggi, mencapai 24,4%. Target pemerintah untuk menurunkannya menjadi 14% pada tahun 2024 jauh lebih tinggi dari angka ini. Malnutrisi, terutama kekurangan protein hewani, yang dimulai sejak dalam kandungan, merupakan penyebab utama *stunting* (Arifa et al., 2024). Dampak *stunting* membuat anak memiliki tubuh yang pendek dan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Selain itu, mereka juga lebih berisiko mengalami penyakit kronis saat dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama *stunting* adalah kekurangan gizi yang berlangsung sangat lama, bahkan sejak masa kehamilan.

Ahli gizi Prof. Sandra Fikawati (kompas.com) mengatakan, pencegahan *stunting* sebaiknya dimulai sebelum menikah, dengan mengonsumsi protein hewani untuk mencegah anemia. Pola hidup yang tidak sehat menjadi penyebab anemia berlebih pada remaja putri. Menurut data Dinas Kesehatan Desa tahun 2024, sekitar 65% remaja melewati sarapan, 97% kurang mengonsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, serta mengonsumsi gula, garam, dan lemak (GGL). Telur, ikan, daging, dan susu merupakan makanan yang mengandung protein hewani. Defisiensi hormon pertumbuhan mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh, mengganggu regenerasi sel, dan mengurangi massa otot. Oleh karena itu, tanpa protein hewani, pertumbuhan dan perkembangan menjadi terhambat. Menurut Fikawati, hal ini mengakibatkan disabilitas kognitif dan malnutrisi (sumber kompas.com). Dampak *Stunting* umumnya terjadi karena diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1.000 hari pertama anak (Duana et al., 2022). Hitungan 1.000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun (Sunaryo et al., 2021). Jika pada rentang waktu ini, gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala

stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran (Daswati et al., 2024).

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas untuk percepatan penurunan stunting. Ke-12 provinsi ini terdiri dari tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah balita *stunting* tertinggi. Kalimantan Barat memiliki tingkat prevalensi stunting tertinggi ketujuh di Indonesia, yaitu sebesar 29,8 persen. Kabupaten Sintang, sebagai kabupaten terbesar kedua di Kalimantan Barat setelah Ketapang, saat ini mendapat perhatian khusus. Hal ini karena Sintang menempati posisi kedua tertinggi dalam tingkat prevalensi stunting di Kalimantan Barat dengan angka 38,2 persen pada tahun 2023, yang jauh melebihi rata-rata provinsi sebesar 29,8 persen. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sintang masih menghadapi beberapa masalah gizi, khususnya *stunting*, sehingga perlu upaya untuk menurunkan angka stunting. Berbagai upaya yang telah dilakukan, dapat mewujudkan Kabupaten Sintang menjadi kabupaten zero *stunting*, serta menuju Kabupaten Sintang sehat dalam mewujudkan Indonesia emas tahun 2045.

Upaya percepatan penurunan angka *stunting*, Pemkab Sintang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pencegahan *Stunting* dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Kolaboratif Percepatan Penurunan *Stunting*. Program penurunan *stunting* di Kecamatan Kayan Hulu merupakan upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi masalah gizi kronis pada anak balita. Program ini dirancang untuk mencapai target dalam menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Kayan Hulu. Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, terdapat hambatan yaitu keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Dana yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk menjalankan seluruh program yang diperlukan, mulai dari sosialisasi, penyediaan makanan tambahan, hingga pelatihan kader.

Kecamatan Kayan Hulu, yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sintang, menghadapi tantangan besar dalam penurunan angka *stunting*. Faktor-faktor penyebabnya antara lain keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang, dan masalah infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan pangan dan gizi. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Sintang sebesar 24,8 persen, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, sedangkan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 18,7 persen. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sintang masih menghadapi beberapa masalah gizi, khususnya *stunting*, sehingga perlu upaya untuk menurunkan angka *stunting* sampai 21,8 persen sesuai target Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2025. Berbagai upaya yang telah dilakukan, dapat mewujudkan Kabupaten Sintang menjadi kabupaten zero *stunting*, serta menuju Kabupaten Sintang sehat dalam mewujudkan Indonesia emas tahun 2045.

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang sudah diimplementasikan, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini termasuk koordinasi antar lembaga pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mengurangi angka stunting di Kecamatan Kayan Hulu, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.

Penelitian terdahulu telah mengevaluasi implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di berbagai wilayah di Indonesia, masih terdapat kekurangan penelitian yang fokus secara khusus pada Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial dan geografis unik yang mempengaruhi efektivitas kebijakan *stunting*, namun belum banyak didokumentasikan. Selain itu, hambatan dan faktor pendukung lokal dalam pelaksanaan kebijakan ini di Kecamatan Kayan Hulu juga masih kurang dianalisis secara mendalam, terutama dalam konteks kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kebaharuan penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan memfokuskan pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Kayan Hulu, yang merupakan wilayah dengan tantangan spesifik seperti kondisi geografis terpencil dan keberagaman budaya. Kebaharuan juga terletak pada analisis mendalam terhadap mekanisme kolaborasi antar pemangku kepentingan lokal, pemberdayaan kader kesehatan, serta adaptasi strategi kebijakan nasional ke dalam konteks lokal yang spesifik. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif untuk peningkatan efektivitas penurunan *stunting* di daerah dengan karakteristik serupa di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini berfokus pada penggambaran dan pemaparan secara mendetail berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang ada di masyarakat sebagai objek studi. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan realitas sosial yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian yang menggambarkan ciri, karakteristik, atau tanda-tanda khusus dari kondisi tersebut, tanpa melakukan intervensi atau manipulasi. Dengan demikian, penelitian ini mampu mengangkat fenomena sosial ke permukaan untuk dipahami secara lebih komprehensif dan sistematis, sehingga gambaran yang dihasilkan menjadi representasi yang jelas mengenai situasi dan fenomena tertentu di masyarakat yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, dengan alasan utama pemilihan lokasi tersebut karena adanya permasalahan yang masih signifikan terkait pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* yang belum optimal. Kecamatan Kayan Hulu masih menghadapi tingginya angka prevalensi *stunting* yang menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian khusus untuk memahami hambatan dan faktor yang mempengaruhi efektivitas intervensi *stunting* di daerah ini. Penelitian dilaksanakan pada periode Januari hingga Februari 2025, agar dapat memperoleh data dan informasi terkini yang relevan dengan situasi nyata di lapangan.

Penelitian yang dilakukan peneliti sendiri berperan sebagai subjek utama yang mengelola dan mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Sumber data penelitian berasal dari para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat aktif dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan penanganan dan upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Sintang. Adapun kriteria dalam pemilihan para informan ini mencakup berbagai instansi dan lembaga yang bekerja secara sinergis dan massif dalam melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di wilayah ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengobservasi, melakukan wawancara, dan memahami dinamika kebijakan dari sudut pandang langsung para pelaku yang paling berkaitan secara praktis dengan pelaksanaan kebijakan.

Hasil

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja sebuah kebijakan sangat bergantung pada adanya ukuran dan tujuan yang jelas. Ukuran dan tujuan tersebut berfungsi sebagai pedoman atau standar dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang. Arah kebijakan yang akan dijalankan sangat dipengaruhi oleh ukuran dan tujuan tersebut. Ukuran kebijakan dalam konteks ini memberikan gambaran mengenai target-target yang ingin dicapai selama proses implementasi. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan tujuan akhir yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Peneliti menganalisis percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, dengan menggunakan teori *Van Meter* dan *Van Horn* yang mencakup enam dimensi, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) sikap para pelaksana; dan (6) lingkungan politik, ekonomi, serta sosial.

Standar

Sebuah kebijakan dapat berhasil dilaksanakan dan mencapai sasaran jika didukung oleh dasar hukum yang kokoh. Kebijakan publik harus dilegitimasi melalui bentuk peraturan hukum untuk memastikan keabsahannya di lapangan, sebagaimana juga berlaku pada Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, para pelaksana kebijakan wajib memahami secara mendalam standar dan target tujuan saat mengimplementasikan kebijakan, karena ketidakpahaman atau penolakan terhadapnya dapat menyebabkan kegagalan dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Pemahaman menyeluruh tentang ukuran dan tujuan kebijakan menjadi tanggung jawab utama setiap pelaksana, sebagai acuan untuk mencapai kebijakan secara menyeluruh. Kejelasan ukuran dan tujuan yang spesifik serta komprehensif memungkinkan penilaian sukses atau gagalnya implementasi di akhir proses, yang sangat bergantung pada kesadaran pelaksana terhadap elemen-elemen tersebut serta kaitannya dengan disposisi para implementor (Suadi, 2010).

Diskusi *Stunting* Tingkat Kabupaten Kayan Hulu merupakan forum koordinasi dan sinergi antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sintang dan TPPS Kabupaten Kayan Hulu dalam upaya mempercepat penurunan angka *stunting*. Kegiatan ini melibatkan 23 TPPS Desa se-Kecamatan Kayan Hulu serta berbagai pemangku kepentingan, seperti Camat Kayan Hulu, Kepala Puskesmas Nanga Tebidah, para Kepala Desa, Tim PKK Kecamatan dan Desa, Ketua BPD, Pendamping Desa, bidan, penyuluh KB, kader KB dan Posyandu, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Selain itu, unsur keamanan seperti Kapolres dan Dandim turut hadir untuk mendukung kolaborasi lintas sektor. Diskusi bertujuan menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian, serta merumuskan strategi terpadu penanganan *stunting*.

Tabel 1. *Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting*

Gambar Kegiatan	Deskripsi Gambar
	Tim TPPS Kabupaten [Pemerintah Sintang] memiliki komitmen tinggi dalam strategi percepatan penurunan [angka <i>stunting</i>]. Hingga saat ini, telah dibentuk sebanyak 14 [TPPS Kecamatan] dan 407 [TPPS di kelurahan desa] di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Dengan adanya jaringan [TPPS] yang lengkap dan tersebar merata tersebut, diharapkan upaya percepatan pengurangan [<i>stunting</i>] dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah

Gambar Kegiatan	Deskripsi Gambar
	<i>Kader Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Kayan Hulu</i> Tujuan dari sebuah kebijakan merupakan penjabaran spesifik mengenai target yang hendak diraih melalui kebijakan tersebut, termasuk tolok ukur untuk menilai keberhasilannya. Dengan pemahaman terhadap tujuan kebijakan, perencanaan aktivitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan dapat disusun secara efektif sehingga tujuan tersebut tercapai. Pemahaman yang baik dari para pelaksana program menjadi kunci keberhasilan implementasi. Apabila pelaksana program tidak memahami alasan dibentuknya kebijakan percepatan penurunan stunting, maka pelaksanaan program tersebut berpotensi tidak optimal.
	<i>Pengukuran Tingkat Badan Balita Oleh Kader Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Kayan Hulu</i> Salah satu metode evaluasi selain menghitung capaian program adalah dengan mengukur tingkat kepuasan penerima layanan. Dari hasil wawancara, informan mengungkapkan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh kader melalui posyandu balita berjalan dengan baik. Informan juga menyatakan bahwa mereka sudah merasakan manfaat dari program tersebut. Namun, informan menyampaikan bahwa program yang diterima tidak menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
	<i>Penimbangan Berat Badan Balita Oleh Kader Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Kayan Hulu</i> "...Sebagai wakil pemerintah, kami menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang terkait penanggulangan stunting pada balita di Kecamatan Kayan Hulu telah diterapkan secara tepat di setiap desa. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Kayan Hulu. Namun, dalam situasi di mana keluarga kurang mendapat perhatian memadai, kemungkinan besar ibu hamil tidak akan menjalani pemeriksaan kehamilan atau enggan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan bidan di wilayah mereka"

Sasaran

Strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Kayan Hulu untuk mencapai tujuan tertentu melibatkan pengembangan dan pengelolaan fasilitas khusus. Oleh karena itu, pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran kebijakan publik diubah menjadi program-program aksi yang dirancang untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan demikian, berbagai program dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang sama, dan tindakan program ini dapat diorganisir dalam bentuk proyek-proyek spesifik.



Gambar 5. *Pemberian Arahan oleh Camat terkait Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting*

Di Kecamatan Kayan Hulu, tim koordinasi penanggulangan stunting berperan dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Program ini diharapkan dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama ibu hamil dan balita. Sebelum pelaksanaan, tim koordinasi Kecamatan Kayan Hulu, yang terdiri dari kader, bidan desa, perangkat desa, dan Camat Kayan Hulu, akan melakukan identifikasi terhadap warga yang mengalami stunting. Berdasarkan wawancara, Sekcam Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang menyatakan: *“Secara prinsip, tim koordinasi penanggulangan stunting telah dilaksanakan dengan baik sebagai pengarah dan pelaksana program di tingkat Kecamatan Kayan Hulu. Mereka telah mengadakan pertemuan dengan masyarakat secara teratur dan selalu bekerja sama dengan perangkat Kayan Hulu terkait balita stunting. Mengingat jumlah bantuan keluarga miskin yang masih besar, jaminan sosial harus dilanjutkan jika ada dana pemerintah.”*

Sumber Daya

Meskipun tujuan kebijakan publik telah dirumuskan secara jelas dan rasional, keberhasilan atau kegagalannya tidak hanya ditentukan oleh aspek tersebut. Efektivitas implementasi sangat bergantung pada optimalisasi sumber daya yang ada, meliputi sumber daya manusia seperti kompetensi pelaksana serta dukungan finansial. Sumber daya ini menjadi elemen krusial untuk menjamin kelancaran proses, karena tanpa ketersediaannya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen statis tanpa dampak nyata.

Sumber Daya Manusia (Staf)

SDM diketahui jumlah tenaga kesehatan dan kader yang terbatas membuat sulit untuk menjangkau seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. Berikut wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK di Kecamatan Kayan Hulu; *“Terkait sumber daya khususnya sumber daya manusia, kami sudah menyiapkan dan mencukupi semua yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program-program penurunan stunting, Pelaksanaan program stunting didukung oleh tenaga di luar kesehatan seperti kader penyuluhan dan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk rincian jumlah kader TPK masih belum mencukupi dimana. hanya terdapat 2 orang tenaga kesehatan, 2 orang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan 1 orang Keluarga Berencana (KB) untuk kecamatan Kayan Hulu, dalam pelaksanaan penanggulangan stunting, petugas sudah berkompeten dibidangnya, hal ini dikarenakan yang menjadi petugas atau kader dalam pelaksanaan penanggulangan ini merupakan orang lama dalam pelaksanaan penanggulangan stunting ini”* Dalam Pelaksanaan program stunting didukung oleh tenaga di luar kesehatan seperti kader penyuluhan dan kader TPK, dalam penanggulangan masalah *stunting*, petugas sudah berkompeten.

Sumber Daya Peralatan dan Anggaran

Terkait anggaran dalam mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan Kayan Hulu, Sekda Kab. Sintang menyampaikan sebagai berikut: *“Untuk anggaran dari program-program stunting ini adalah bersumber dari dana APBD, tetapi juga ada sumbangan dana diluar APBD.”* Dari pelaksanaan program-program penurunan stunting diketahui bahwa anggarannya berasal dari APBD, namun juga terdapat bantuan dana diluar APBD. Sumberdaya peralatan merupakan fasilitas dan sarana pendukung yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional implementasi suatu kebijakan. Peralatan yang biasa digunakan adalah peralatan yang berhubungan erat dengan kegiatan administrasi maupun kegiatan lapangan. Terbatasnya sumberdaya peralatan yang dimiliki suatu lembaga/instansi akan menyebabkan

pekerjaan tidak berjalan secara maksimal sehingga akan berdampak pada proses pelaksanaan terhadap suatu tujuan kebijakan.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Para Pelaksana



Gambar 6. Wawancara Penulis Dengan Kepala UPTD Puskesmas di Kecamatan Kayan Hulu

Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu menyelenggarakan koordinasi dengan puskesmas untuk memperbesar jangkauan kampanye sosialisasi memakai alat seperti pamflet. Media lain seperti poster, baliho, serta sesi posyandu juga dimanfaatkan guna memberi pemahaman kepada warga tentang krusialnya antisipasi *stunting*. Untuk mengimplementasikan kebijakan penanganan *stunting* pada balita di Kecamatan Kayan Hulu, aspek komunikasi perlu terhubung dengan Pihak Puskesmas, kepala desa lokal, pendamping sosial, kader kesehatan, dan bidan desa. Koordinasi tim yang solid memastikan pendampingan berlangsung maksimal dan tepat sasaran. Dari wawancara dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Kayan Hulu, terungkap: *“Tim koordinasi penanggulangan stunting di Kecamatan Kayan Hulu melakukan komunikasi kolaboratif dengan kader, bidan desa, kepala desa, serta camat setempat untuk mengatasi masalah stunting. Tim pendamping secara konsisten menyediakan bimbingan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita, mengenai kebutuhan nutrisi anak selama proses pelaksanaan. Selain itu, kecamatan dan puskesmas melakukan pemantauan melalui data posyandu untuk mengidentifikasi anak-anak yang mengalami stunting, sehingga perkembangan janin serta kesehatan ibu hamil dapat dipantau secara akurat”*.

Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana sudah memadai yang ditandai dengan adanya berbagai Surat Edaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2024 tentang Pemerintahan Kolaboratif yang menjadi payung hukum pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Sintang. Sebagaimana hasil wawancara Camat Kecamatan Kayan Hulu dengan mengemukakan bahwa: *“Setiap SKPD telah memiliki pembagian tugas dan fungsi yang spesifik. Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting sangat memerlukan sinergi dan koordinasi antar pelaksana, mengingat pencegahan stunting bergantung pada kolaborasi multisector. Kebijakan tidak akan efektif tanpa dukungan dan kerjasama lintas instansi”*.

Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang perlu mendapat perhatian untuk mencegah terjadinya *stunting*. Para ibu hamil akan melakukan cek kehamilan sebanyak 6 kali dan 2 kali di antaranya diperiksa oleh dokter, konsumsi gizi seimbang sesuai porsinya, meminum tablet tambah darah, mengikuti kelas ibu hamil,

melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya ini sangat diperlukan, mengingat stunting akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dewasa. Sehingga dengan memberikan perhatian yang tepat pada kesehatan ibu hamil, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya stunting pada anak. Berdasarkan hasil wawancara Sekcam di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang menyatakan : *“Kita sangat memperhatikan warga terhadap penurunan stunting, misalnya pada program pelayanan ibu hamil sampai nifas (bayi 0-6bulan), di masa-masa tersebut pemerintah benar-benar memperhatikan dan peduli terhadap warga negara, khususnya untuk pencegahan stunting, dengan memberi susu, vitamin, dan makanan sehat bergizi untuk anak stunting”*

Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang mempunyai balita *stunting* di Kecamatan Kayan Hulu: *“kami hidup seadanya, untuk makanan yang penting bisa kenyang, soal gizi itu belakangan, dan keluarga kami tidak ada sumber pendapatan tetap, suami saya kerjaannya serabutan”* Implementasi program penurunan *stunting* di Kecamatan Kayan Hulu masih belum optimal akibat kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang mendukung. Kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh minimnya dukungan dari komunitas lokal secara sosial-ekonomi, yang berdampak pada keterlibatan mereka dalam upaya tersebut. Hambatan sosial-ekonomi ini menjadi penghalang utama di seluruh kecamatan, sehingga pemerintah daerah perlu segera merancang solusi seperti bimbingan untuk kemandirian keluarga dalam pemenuhan gizi atau pemberian bantuan khusus bagi keluarga penerima manfaat program.

Pembahasan

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dari wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu mengenai evaluasi program konvergensi *stunting*, diperoleh temuan bahwa belum ada rapat koordinasi khusus untuk menilai realisasi program percepatan penurunan *stunting* oleh masing-masing OPD. Berdasarkan temuan bahwa dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dalam penanggulangan *stunting*, Kecamatan Kayan Hulu berkomunikasi dengan tim sumber daya manusia. Mereka bekerja sama dengan Kader, Desa, Camat Kayan Hulu, dan Bidan Desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. Pelaksana kebijakan dan pengawas kelanjutan program di Kecamatan Kayan Hulu telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Penyuluhan rutin diberikan kepada kelompok berisiko stunting, masyarakat luas, serta calon pengantin untuk mencegah peningkatan angka stunting di masa mendatang. Temuan ini selaras dengan studi terdahulu yang menyatakan bahwa beragam pendekatan tersedia untuk mencegah atau menangani *stunting*. Pendekatan pokoknya adalah mengantisipasi faktor penentu stunting agar kondisi tersebut tidak muncul. Pemerintah dapat menyusun kebijakan pencegahan stunting melalui berbagai taktik yang memerlukan kolaborasi dari pemimpin pusat hingga lokal guna mewujudkan sasaran yang dirumuskan, sehingga penyuluhan dan strategi pencegahan dapat dijalankan secara fleksibel dengan melibatkan multipihak (Tandean et al., 2022)

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Para Pelaksana

Komunikasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan kinerja pelaksana kebijakan di tingkat organisasi atau lembaga. Melalui komunikasi yang efektif, koordinasi antarunit terkait dapat terjalin secara harmonis dan saling melengkapi. Interaksi antarlembaga menyediakan

panduan prosedural untuk mencapai sasaran kebijakan, sekaligus membangun hubungan kolaboratif yang saling mendukung demi mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan.

Dalam proses komunikasi secara umum terdapat tiga bentuk yaitu komunikasi kebawah (*downward communication*), komunikasi ke atas (*upward communication*) dan komunikasi horizontal (*horizontal communication*). komunikasi kebawah dapat diartikan komunikasi mengalir dari tingkat atas kepada orang-orang tingkat bawah. Komunikasi ke atas dapat diartikan komunikasi yang disampaikan dari tingkat bawah ke tingkat atas sebuah organisasi, sedangkan komunikasi horizontal adalah komunikasi yang mengalir melintasi berbagai sektor dan fungsi dari sebuah organisasi.

Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu mengadakan pertemuan dengan puskesmas untuk memperbesar cakupan kampanye melalui pamflet. Media tambahan seperti poster, baliho, dan sesi posyandu dimanfaatkan guna mensosialisasikan pentingnya pencegahan *stunting* kepada masyarakat. Warga telah menangkap pesan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan *stunting* yang disampaikan puskesmas serta kader pada setiap kegiatan posyandu. Meski demikian, penyuluhan dari pemerintah kecamatan belum bersifat periodik seperti yang dilakukan puskesmas. Pelaksanaan penanggulangan *stunting* oleh Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dilaksanakan melalui sosialisasi-sosialisasi yang diberikan terkait pencegahan *stunting*, rapat-rapat rutin serta pelaksanaan pengawasan, serta secara informal melalui grup Whatsapp (Shauma & Purbaningrum, 2022).

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu telah menunjukkan komitmen dan keterlibatan yang kuat dalam penanggulangan *stunting* di Kecamatan Kayan Hulu. Melalui wawancara dengan Kepala Pemerintah, terungkap bahwa mereka secara aktif berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah Hal ini menandakan adanya kerjasama lintas sektor dalam upaya mengatasi masalah *stunting* di masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu berusaha untuk memastikan bahwa semua aspek terkait dengan penanggulangan *stunting* dapat ditangani secara baik. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komitmen dan koordinasi ini merupakan aspek dari perilaku hubungan antar organisasi yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan (Aji & Novaria, 2025). Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Purbalingga disebabkan oleh pendekatan yang menekankan berbagai dimensi agar pelaksanaan optimal, mencakup aspek kebijakan, pelaku serta organisasi terkait, dan kondisi lingkungan (Saputra et al., 2022).

Karakteristik Badan Pelaksana

Dimensi keempat yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah karakteristik pelaksana utama. Karakteristik ini mencakup struktur birokrasi, norma yang berlaku, serta pola interaksi dalam organisasi, termasuk elemen formal seperti susunan organisasi dan aspek informal seperti sifat personel. Struktur birokrasi bertugas mengatur alur kerja kebijakan, mengelola penyebaran tanggung jawab antar unit, serta memastikan koordinasi yang efektif, dengan fokus pada organisasi formal dan informal yang terlibat. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) memungkinkan pengukuran kinerja organisasi melalui indikator dan target yang jelas. SOP secara implisit menyediakan panduan teknis dengan standar kuantitas serta kualitas instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa karakteristik suatu badan yaitu dalam implementasi

kebijakan penyusunan anggaran adalah suatu proses kegiatan yang terencana dengan aturan-aturan yang ada untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan (Jailani & Adiah, 2024).

Sikap/Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana

Dimensi berikutnya menurut *Van Meter* dan *Van Horn* yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah disposisi atau sikap pelaksana. Sikap didefinisikan sebagai evaluasi terhadap objek, individu, atau kejadian, yang sangat menentukan suksesnya implementasi kebijakan publik. Tanpa sikap positif dari pelaksana, kebijakan tidak akan efektif karena penolakan dapat menyebabkan kegagalan total, sehingga kinerja bergantung komitmen dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas. Pemerintah juga mengungkapkan bahwa pendataan dilakukan secara rutin di setiap kegiatan posyandu dan bahkan meluas hingga ke rumah-rumah masyarakat, menunjukkan keseriusan sikap dan komitmen dalam memantau perkembangan gizi anak. Meskipun terdapat perbedaan dalam frekuensi pendataan antara dinas dan puskesmas, namun keduanya menunjukkan keterlibatan aktif dalam pemantauan gizi anak. Dengan adanya alokasi dana khusus dari APBN/APBD untuk penanganan *stunting*, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Pemerintah, terlihat bahwa anggaran telah diprioritaskan untuk masalah kesehatan yang krusial ini. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa pelaksanaan APBN di Indonesia selalu melibatkan evaluasi rutin terhadap program *stunting* oleh pemerintah. Peran APBN sangat strategis dalam mendukung pencegahan *stunting*, ketahanan pangan, serta alokasi dana untuk seluruh aspek terkait. Dengan demikian, orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan *stunting* (Smith et al., 2025).

Selain evaluasi dalam bentuk pendataan, juga dapat menerapkan evaluasi dengan menganalisis kinerja program menggunakan kriteria *Dunn*, seperti yang digunakan pada Program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karawang (Fadhilurrohman, 2025). Dapat juga melakukan Rapat koordinasi untuk memastikan angka *stunting* di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. Penelitian lain menunjukkan bahwa Rapat koordinasi seperti Audit Kasus *Stunting* Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo merupakan bagian dari strategi evaluasi untuk memantau kemajuan program secara berkala. Hal ini memastikan bahwa program-program yang dijalankan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan hasil yang dapat diukur dan dapat ditingkatkan keefektifannya. Bukti konkret dari upaya ini terlihat dari penurunan signifikan angka *stunting* di Kabupaten Sidoarjo, dari 16,1% pada tahun 2022 menjadi 8,4% pada tahun 2023 (Muharram et al., 2025).

Lingkungan Politik, Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*, termasuk dinamika politik, respons warga terhadap inisiatif pelaksana, serta pemahaman mereka tentang program tersebut. Di Kecamatan Kayan Hulu, penerimaan masyarakat terhadap program penanggulangan *stunting* belum sepenuhnya optimal karena faktor kepercayaan dan ketidakstabilan ekonomi yang menyulitkan pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga. Hal ini menyebabkan antusiasme rendah karena prioritas pada pekerjaan dan pendapatan, meskipun penerima program mendapat dukungan keluarga yang positif. Namun, pemenuhan gizi ibu hamil dan anak tetap bergantung pada bantuan pelaksana seperti makanan tambahan, camilan bergizi, vitamin, serta layanan kesehatan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Salem memiliki kendala dalam pemenuhan kebutuhan gizi seimbang untuk keluarganya karena faktor ekonomi yang belum stabil sehingga hal tersebut berpengaruh

terhadap antusias masyarakat yang kurang karena mereka hanya berfokus untuk bekerja, sehingga kurang memperdulikan asupan gizi anak dan keluarganya. Sementara untuk masyarakat yang mendukung dan menerima program penurunan *stunting*, yang membedakannya, mereka mendapatkan dukungan dari keluarga, sehingga memberikan dampak positif bersedia menerima program penurunan *stunting* tersebut. Tetapi tetap terkendala dari segi ekonomi, sehingga pemenuhan gizi anak atau ibu hamil masih bergantung dari pemberian implementor dalam penurunan *stunting* seperti makanan tambahan, cemilan bergizi, vitamin serta layanan kesehatan (Supriyanto & Rahman, 2023). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumendi masih belum memprioritaskan masalah gizi sebagai yang utama karena tingkat ekonomi menengah kebawah serta sebagian besar bermata pencarian sebagai petani (Marwiyah et al., 2022).

Ketersediaan pangan merupakan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup baik segi kuantitas dan kualitas dan keamanannya. Kurang tersedianya pangan dalam suatu keluarga secara terus menerus akan menyebabkan terjadinya penyakit akibat kurang gizi pada keluarga. Status ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan orang tua dan jumlah anggota keluarga. Status ekonomi keluarga akan mempengaruhi kemampuan pemenuhan gizi keluarga maupun kemampuan mendapatkan layanan kesehatan. Anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih berisiko mengalami *stunting* karena kemampuan pemenuhan gizi yang rendah, meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Batumandi (studi kasus pada desa Mampari dan desa Banua Hanyar) cukup efektif menurunkan jumlah balita *stunting* dengan persentasi capaian sebesar 45 % dimana dari total jumlah balita *stunting* yaitu sebanyak 31 anak, sebanyak 5 orang anak yang berhasil diperbaiki gizinya menjadi balita normal sedangkan sisanya yaitu 26 orang masih masuk kategori balita *stunting*. Faktor pendukung program ini adalah Kerjasama yang baik antara petugas gizi dari UPT Puskesmas Batumandi, bidan desa, kader Posyandu dan kader PMT (Norsanti, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dengan ini bisa ditarik kesimpulan jika: 1). Dari wawancara, observasi, dan dokumen yang dikumpulkan peneliti selama studi lapangan, disimpulkan bahwa pemahaman *stakeholder* mengenai tujuan pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* sangat memadai. 2). Sumberdaya, baik sumber daya manusia dan Sumberdaya Anggaran masih belum mencukupi dalam Implementasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Kayan Hulu, diketahui jumlah tenaga kesehatan dan kader yang terbatas membuat sulit untuk menjangkau seluruh masyarakat. 3). Komunikasi antar organisasi sudah optimal dilakukan oleh pihak Kecamatan Kayan Hulu, dalam menjalankan kebijakan percepatan penurunan *stunting* sangat dibutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik diantara pelaksana. 4). Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa implementor di tingkat kecamatan sudah melaksanakan program ini sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. 5). Sikap pelaksana atau disposisi sudah cukup terpenuhi yang dibuktikan dengan sikap pelaksana dari pemerintah yang cepat dan tanggap dalam melakukan upaya penurunan *stunting* melalui pendampingan kepada calon pengantin hingga anak yang terkena *stunting* akan dipantau dan diberikan pelayanan Kesehatan. 6). Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dianggap belum

optimal, terlihat dari adanya penolakan partisipasi masyarakat dalam program penurunan *stunting* serta kesulitan memenuhi gizi seimbang keluarga akibat keterbatasan ekonomi. Faktor ini menghambat upaya penekanan prevalensi *stunting* di Kecamatan Kayan Hulu.

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antar instansi dalam mempercepat penurunan *stunting* di Kecamatan Kayan Hulu. Namun, keterbatasan penelitian terletak pada cakupan waktu yang singkat dan fokus yang terbatas pada satu kecamatan, sehingga hasilnya kurang mewakili kondisi lebih luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji intervensi jangka panjang dan melibatkan wilayah yang lebih luas guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Aji, R. F., & Novaria, R. (2025). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(3), 1275–1284. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i3.7255>
- Arifa, J., Putri, H. R., Tina, T. A., Indrasoni, Y., & Elvira, M. (2024). Penyebab Utama Stunting: Faktor Gizi dan Sosial Ekonomi (Studi Kasus Nagari Garagahan). *Teknovokasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 136–140. <https://doi.org/10.59562/teknovokasi.v2i3.3666>
- Ansori, M. (2022). Pengaruh Penyuluhan Gizi terhadap Peningkatan Pengetahuan Stunting pada Kelompok Masyarakat di Desa Kelampaian Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i1.7>
- Daswati, D., & Ahsan, S. C. (2024). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Donggala. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 529–552. <https://doi.org/10.29210/020244123>
- Duana, M., Siregar, S. M. F., Anwar, S., Musnadi, J., Husna, A., & Nursia, L. E. N. (2022). Dampak Pernikahan Dini pada Generasi Z dalam Pencegahan Stunting. *Comsep: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 195–200. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292>
- Fadhlurrohman, H. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dalam Capaian SDGs di Kabupaten Karawang. *Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 857–875. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.757>
- Hatijar, H. (2023). The Incidence of Stunting in Infants and Toddlers. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(1), 224–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v12i1.1019>
- Imeldawati, R. (2025). Dampak Terjadinya Stunting terhadap Perkembangan Kognitif Anak: Literature Review. *Jurnal Medika Nusantara*, 3(1), 101–107. <https://doi.org/10.59680/medika.v3i1.1632>
- Jailani, J., & Adiah, M. (2024). Implementasi Kebijakan dalam Penyusunan Anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Kota Palembang. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(2), 166–176. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i2.2956>

- Marwiyah, S., Devi, N, U, K., & Jailani, M. (2022). Implementasi Program Welijo Peduli Stunting Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tongas (Studi pada Desa Sumendi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 10374-10379.
- Muharram, F., Cholifah, S., & Utami, P. J. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 274–287. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3790>
- Norsanti, N. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(1), 10–21. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825>
- Novianti, R., Purnaweni, H., & Subowo, A. (2021). Peran Posyandu untuk Menangani Stunting di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 378–387. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i3.31425>
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v9i1.253>
- Rahmawati, A., Nurmawati, T., & Permata Sari, L. (2019). Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan Orang Tua tentang Stunting pada Balita. *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(3), 389–395. <https://doi.org/10.26699/jnk.v6i3.art.p389-395>
- Saputra, A. S., Suryoto, S., & Sutikno, C. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 162–170. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.8335>
- Shauma, N, U., & Purbaningrum, D, G. (2025). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 200-207.
- Smith, M. R., Pratama, I. N., Silmi, H., Winardi, L. D., Nurwahyuningsih, N., Marwah, M., Pratama, W., Alam, N., Saputra, A., Surya, L. D., & Pratama, A. A. (2025). Evaluasi Peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam Mendukung Program Stunting dan Ketahanan Pangan di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 9–22. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i9.1314>
- Sunaryo, D. R., Candradewini, C., & Arifianti, R. (2021). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 4(4), 205–213. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716>
- Supriyanto, H., & Rahman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 241-254. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.177>